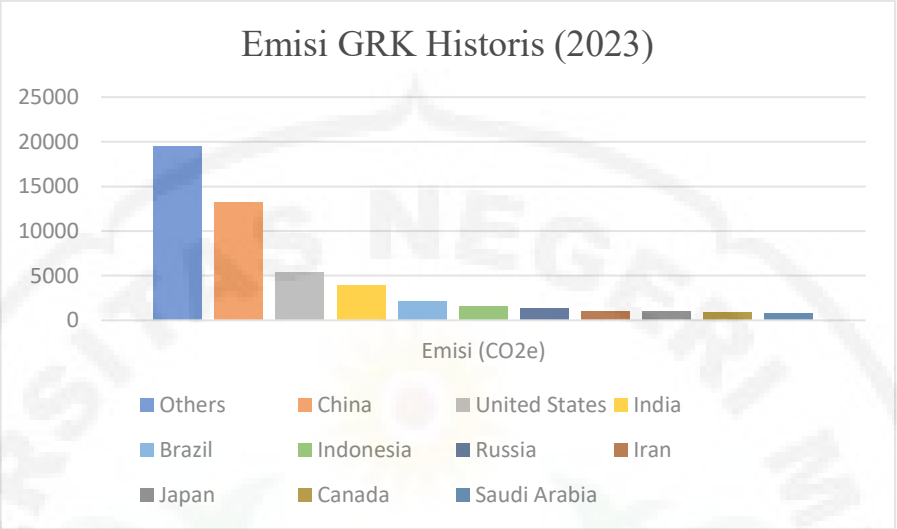
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim merupakan isu global yang menjadi salah satu ancaman terbesar terhadap keberlangsungan dunia pada abad ke-21 karena dampaknya yang meluas terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, memaksa seluruh negara untuk meninjau ulang model pembangunan ekonomi mereka. Fenomena pemanasan global yang ekstrem tercermin dari data *Copernicus Climate Change Service* yang menobatkan tahun 2023 dan 2024 sebagai tahun terpanas dalam sejarah pencatatan suhu global, dengan kenaikan suhu rata-rata mendekati ambang batas kritis 1,5°C di atas level pra-industri. Kondisi ini memicu desakan internasional yang dituangkan dalam Perjanjian Paris, di mana negara-negara penandatangan, salah satunya Indonesia, telah menyatakan komitmen untuk melakukan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara signifikan. Dalam konteks bisnis global, paradigma profit *maximization* kini bergeser menuju sustainable business, di mana tanggung jawab lingkungan tidak lagi sekadar kewajiban moral, melainkan indikator vital bagi keberlanjutan perusahaan jangka panjang. Investor global semakin mengintegrasikan kriteria *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam keputusan investasi mereka, menuntut transparansi yang lebih tinggi terkait jejak karbon perusahaan (Ren, 2025).

Emisi karbon merupakan bagian paling dominan dari emisi Gas Rumah Kaca (GRK), terutama dalam bentuk karbon dioksida (CO_2) yang dihasilkan dari aktivitas pembakaran bahan bakar fosil, proses industri, serta perubahan penggunaan lahan. Meskipun GRK terdiri dari berbagai jenis gas seperti metana (CH_4) dan dinitrogen oksida (N_2O), emisi karbon tetap menjadi penyumbang terbesar terhadap total emisi GRK global (*Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2021; *International Energy Agency*, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan emisi karbon memiliki keterkaitan langsung dengan akumulasi GRK yang memicu pemanasan global, sehingga pengelolaan serta pengungkapan emisi karbon menjadi aspek yang semakin krusial dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.



Gambar 1. 1 10 Negara Penghasil Emisi Terbesar Secara Global

Berdasarkan laporan dari *World Resources Institute* (WRI), lebih dari 50% emisi gas rumah kaca (GRK) dunia terkonsentrasi pada sepuluh negara dengan tingkat kontribusi tertinggi. Data yang disajikan melalui platform *Climate Watch* oleh *World Resources Institute Indonesia* menunjukkan bahwa Tiongkok menempati posisi teratas sebagai penghasil emisi terbesar secara global. Di sisi lain, Indonesia juga masuk dalam kelompok sepuluh besar negara penyumbang emisi, dengan porsi sekitar 2% dari total emisi dunia. Struktur emisi nasional didominasi oleh aktivitas di sektor energi dan industri. Dalam merespons tantangan perubahan iklim, pemerintah Indonesia kini menyusun dan memperkuat berbagai regulasi strategis yang diarahkan pada pengendalian emisi di masa mendatang. Upaya tersebut menuntut keterlibatan aktif para pelaku usaha dan pihak-pihak yang berkontribusi terhadap emisi karbon agar turut mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional pada tahun 2030.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Indonesia telah menegaskan target penurunan emisi melalui dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang diperbarui, dengan ambisi menurunkan emisi secara signifikan pada tahun 2030 baik melalui upaya mandiri maupun dengan dukungan internasional (Sekretariat Jenderal PPI, 2022). Komitmen ini diperkuat melalui partisipasi aktif Indonesia dalam forum global seperti *Conference of the Parties* di bawah kerangka *United Nations Framework Convention on Climate Change*, yang mendorong integrasi kebijakan iklim ke dalam perencanaan pembangunan

nasional. Konsekuensinya, sektor korporasi sebagai salah satu kontributor utama emisi dituntut untuk tidak hanya melakukan mitigasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengungkapan emisi karbon yang terukur dan terstandar sebagai bagian dari praktik tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

Peningkatan emisi karbon akibat aktivitas produksi tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi signifikan terhadap stabilitas ekonomi global. Perubahan iklim kini dipandang sebagai risiko ekonomi yang material karena memengaruhi berbagai sektor strategis seperti energi, sumber daya alam, kelautan, air bersih, dan ketahanan pangan. Gangguan terhadap sektor-sektor tersebut berimplikasi langsung pada biaya produksi, distribusi, serta keberlanjutan operasional perusahaan. Dalam perspektif ekonomi, kondisi ini meningkatkan ketidakpastian pasar, memicu volatilitas harga komoditas, dan memperbesar risiko investasi dalam jangka panjang (Campiglio et al., 2023).

Berbagai lembaga internasional menegaskan bahwa risiko perubahan iklim tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga transisional dan sistemik terhadap stabilitas keuangan global. *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC, 2022) menekankan bahwa peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian iklim ekstrem dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan serta memperlemah produktivitas jangka panjang. Selain itu, *World Bank* (2023) melaporkan bahwa perubahan iklim berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi global melalui kerusakan infrastruktur, penurunan hasil pertanian, serta meningkatnya biaya adaptasi dan mitigasi. Sementara itu, *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD, 2017) menegaskan bahwa perusahaan perlu mengidentifikasi dan mengungkapkan risiko serta peluang terkait perubahan iklim karena dampaknya yang material terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Temuan-temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa perubahan iklim telah bertransformasi menjadi risiko ekonomi yang terintegrasi dalam sistem keuangan modern.

Dalam ranah akuntansi, perubahan iklim menghadirkan tantangan signifikan terkait pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan risiko lingkungan

dalam laporan keuangan. Risiko fisik seperti peristiwa cuaca ekstrem, kenaikan permukaan laut, dan kebakaran hutan dapat menyebabkan penurunan nilai aset (*asset impairment*), gangguan rantai pasok, hingga peningkatan liabilitas perusahaan. Selain itu, risiko transisi yang timbul akibat regulasi emisi karbon, perubahan kebijakan lingkungan, serta pergeseran preferensi pasar turut memengaruhi estimasi akuntansi dan keberlanjutan model bisnis perusahaan. Literatur menunjukkan bahwa risiko iklim memiliki implikasi langsung terhadap kualitas pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan investor (Daniel et al., 2025).

Transparansi dalam pengungkapan risiko iklim dan emisi karbon menjadi semakin krusial, khususnya dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Pengungkapan risiko iklim yang komprehensif terbukti memiliki dampak nyata terhadap perilaku pasar serta persepsi risiko oleh investor. Selain itu, tingkat pengungkapan emisi gas rumah kaca dan risiko iklim dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan serta tekanan pemangku kepentingan.Bukti empiris menunjukkan bahwa pengungkapan risiko iklim tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga dapat mendorong pengurangan emisi karbon serta memperkuat kinerja keberlanjutan perusahaan (Yin et al., 2023). Dengan demikian, perubahan iklim tidak lagi semata-mata menjadi isu ekologis, melainkan telah berevolusi menjadi isu ekonomi dan akuntansi strategis yang memengaruhi kualitas pelaporan, manajemen risiko, serta keberlanjutan nilai perusahaan dalam jangka panjang (Fahri et al., 2018).

Sejalan dengan dinamika global tersebut, globalisasi dan percepatan pembangunan ekonomi telah mendorong pertumbuhan sektor industri manufaktur sebagai salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, sekaligus menjadikannya penyumbang emisi gas rumah kaca yang signifikan. Data BPS (2024) menunjukkan sepanjang 2022 industri Indonesia menghasilkan emisi gas rumah kaca sebesar 887,23 juta ton CO_2e, dengan sektor manufaktur (industri pengolahan) menyumbang 340,71 juta ton CO_2e atau sekitar 38% dari total emisi industri nasional (Badan Pusat Statistik, 2024; Katadata, 2024). Angka ini menegaskan bahwa perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI) berada di garda depan dinamika antara pertumbuhan ekonomi dan tekanan terhadap lingkungan (Katadata, 2024; Puspitasari, 2024).

Tekanan terhadap sektor manufaktur tidak hanya berasal dari kontribusinya terhadap emisi nasional, tetapi juga dari meningkatnya komitmen internasional Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim. Melalui ratifikasi Perjanjian Paris dan pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, pemerintah Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca secara bertahap sebagai bagian dari kontribusi nasional (NDC). Komitmen tersebut diperkuat dalam dokumen *Enhanced* NDC yang menegaskan target penurunan emisi sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022). Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan strategis yang mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam sistem ekonomi nasional, termasuk peresmian Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) oleh Presiden Joko Widodo pada September 2023, yang menandai era baru tata kelola lingkungan di mana karbon diperlakukan sebagai instrumen ekonomi bernilai pasar dan menuntut perusahaan melakukan perhitungan serta pengungkapan emisi yang lebih akurat, terstandarisasi, dan transparan (Sekretariat Kabinet RI, 2023). Konsekuensinya, dunia usaha terutama sektor manufaktur dituntut untuk menyesuaikan strategi operasional dan pelaporan mereka agar selaras dengan kebijakan transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Perusahaan tidak hanya dituntut menghasilkan laba, tetapi juga mempertanggungjawabkan dampak lingkungannya melalui praktik pelaporan yang transparan. Salah satu bentuk akuntabilitas tersebut adalah pengungkapan emisi karbon sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui pelaporan emisi yang jelas dan terukur, perusahaan dapat memperlihatkan keseriusan mereka dalam menekan jejak karbon, mengelola risiko perubahan iklim, serta menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan(Nyakuwanika dan Panicker, 2025). Informasi ini menjadi dasar penting bagi para pemangku kepentingan termasuk investor, konsumen, dan masyarakat dalam mengevaluasi kinerja lingkungan perusahaan serta menilai konsistensi antara strategi bisnis dan komitmen keberlanjutan.

Tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengungkapan emisi karbon tidak hanya berada pada manajemen, tetapi juga melekat pada para pemegang saham sebagai penyedia modal. Struktur kepemilikan dapat memengaruhi arah kebijakan dan tingkat perhatian perusahaan terhadap isu lingkungan. Zhang et al., (2024)menjelaskan bahwa perbedaan karakter investor menentukan tingkat keterlibatan mereka dalam mendorong praktik ramah lingkungan. Investor strategis yang memiliki kedekatan dengan operasional dan industri perusahaan cenderung memahami dinamika bisnis, tekanan regulasi, serta ekspektasi pemangku kepentingan, sehingga lebih terdorong untuk mendukung kebijakan pengurangan emisi dan transparansi pelaporan. Sebaliknya, investor finansial yang berorientasi pada imbal hasil jangka pendek dan memiliki keterikatan terbatas dengan perusahaan biasanya menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih rendah dalam isu operasional dan lingkungan. Keterbatasan eksposur terhadap dinamika industri tersebut dapat mengurangi insentif mereka untuk secara aktif mendorong perusahaan mengatasi persoalan emisi karbon.

Sejalan dengan perspektif tersebut, teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan berupaya mempertahankan keberlanjutan operasionalnya dengan memastikan bahwa aktivitas dan pelaporannya selaras dengan nilai serta ekspektasi sosial yang berkembang, sehingga dalam konteks perubahan iklim pengungkapan emisi karbon dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperoleh dan menjaga legitimasi publik di tengah meningkatnya tekanan regulasi dan kesadaran lingkungan(Nisa, 2023), temuan empiris juga menunjukkan bahwa praktik pengungkapan emisi karbon dipengaruhi oleh dinamika legitimasi dan tekanan eksternal perusahaan (Tang et al., 2022). Selanjutnya, teori pemangku kepentingan menekankan bahwa perusahaan bertanggung jawab kepada berbagai pihak yang terdampak oleh aktivitasnya, sehingga tekanan dari investor, regulator, dan masyarakat mendorong peningkatan kualitas serta keluasan pengungkapan karbon sebagai bagian dari akuntansi keberlanjutan (Fitriani et al., 2025), yang pada akhirnya berkorelasi dengan nilai perusahaan dan kinerja keuangan berkelanjutan (Abbas dan Umaroh, 2025), sehingga pengungkapan emisi karbon tidak lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan cerminan strategi legitimasi dan respons terhadap tuntutan pemangku

kepentingan yang berdampak pada kredibilitas serta persepsi pasar terhadap perusahaan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengungkapan emisi karbon menjadi instrumen penting untuk membangun transparansi, akuntabilitas, sekaligus menunjukkan komitmen perusahaan terhadap target dekarbonisasi nasional. Regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR), kewajiban pelaporan PROPER oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta POJK No. 51/POJK.03/2017 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyusunan Laporan Keberlanjutan, mendorong perusahaan terutama yang beremisi tinggi untuk mengungkapkan informasi emisi karbon secara lebih terbuka (Puspitasri., 2024). Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan emisi karbon pada perusahaan manufaktur di Indonesia masih relatif rendah dan bersifat parsial, sehingga informasi mengenai kuantitas emisi, strategi mitigasi, serta target pengurangan emisi sering kali disajikan secara terbatas dan tidak konsisten dari tahun ke tahun (Puspitasari., 2024).

Secara global berkembang berbagai kerangka pelaporan keberlanjutan yang menekankan pentingnya transparansi risiko dan peluang terkait perubahan iklim, seperti pedoman dari *Global Reporting Initiative* dan rekomendasi *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* yang mengharuskan perusahaan mengungkapkan informasi mengenai tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target terkait perubahan iklim. Adopsi kerangka ini tidak hanya meningkatkan kualitas dan komparabilitas laporan, tetapi juga menjadi pertimbangan utama bagi investor institusional dalam pengambilan keputusan investasi berkelanjutan (Velte, 2023) .Di Indonesia, tren investasi berbasis *Environmental, Social, and Governance* (ESG) juga semakin menguat, sehingga perusahaan yang tidak mampu menyajikan data emisi yang terukur dan konsisten berpotensi mengalami penurunan kepercayaan pasar, peningkatan *cost of capital*, serta eksklusi dari portofolio investasi hijau (Dewi dan Muhyarsyah, 2025).

Penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022 menunjukkan bahwa indeks pengungkapan emisi karbon masih relatif rendah, di mana rata-rata hanya sekitar 52% item

pengungkapan yang diungkapkan, sementara 48% lainnya belum diungkapkan, meskipun perusahaan telah memenuhi kewajiban minimum pelaporan (Puspitasari., 2024). Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik pengungkapan cenderung bersifat selektif dan berbasis kepatuhan formal dibandingkan transparansi strategis, sehingga belum sejalan dengan tuntutan investor dan regulator global dalam kerangka *climate related financial disclosures* dan rekomendasi *Task Force on Climate-related Financial Disclosures*, yang berpotensi menimbulkan risiko reputasi dan keuangan bagi perusahaan (Ngo et al., 2023). Dalam konteks tersebut, sektor manufaktur menempati posisi strategis sekaligus problematis karena menjadi tulang punggung perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, namun juga termasuk penyumbang emisi terbesar akibat konsumsi energi fosil, proses produksi intensif, dan limbah industri; data Katadata Green menunjukkan bahwa sektor energi dan industri, termasuk manufaktur, mendominasi profil emisi nasional, dan peningkatan aktivitas industri pascapemulihan COVID-19 pada periode 2022–2024 semakin memperkuat dilema antara pertumbuhan ekonomi dan tekanan lingkungan. Permasalahan utama yang muncul adalah adanya kesenjangan antara kewajiban regulasi termasuk POJK No. 51 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mewajibkan penyusunan Laporan Keberlanjutan dengan praktik pengungkapan di lapangan, di mana banyak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih menyajikan informasi emisi secara normatif, naratif, dan kualitatif tanpa data kuantitatif terukur mengenai *Scope 1, Scope 2, maupun Scope 3,* bahkan cenderung bersifat *greenwashing* atau sekadar pemenuhan formalitas. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai faktor-faktor determinan yang memotivasi manajemen perusahaan manufaktur untuk mengungkapkan emisi karbon secara lebih transparan pada periode krusial 2022–2024, yakni fase transisi pascapandemi menuju implementasi penuh kebijakan pajak karbon.

Rendahnya kualitas transparansi emisi karbon di Indonesia masih menjadi sorotan, baik dari kalangan akademisi maupun media nasional. CNBC Indonesia (2023) melaporkan bahwa mayoritas emiten di Indonesia masih minim dalam mengungkapkan emisi karbon secara komprehensif, bahkan di antara perusahaan

berskala besar, serta belum memiliki peta jalan dekarbonisasi yang jelas dan terukur. Kondisi ini semakin kompleks dengan adanya praktik *greenwashing*, yaitu ketika perusahaan mengklaim diri sebagai entitas ramah lingkungan dalam komunikasi publik, namun klaim tersebut tidak didukung oleh data pengungkapan emisi yang valid dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan, sehingga menciptakan asimetri informasi yang signifikan dan berpotensi menyesatkan investor maupun pemangku kepentingan lainnya. Ketidakkonsistenan ini memunculkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan manajemen dalam mengungkapkan informasi lingkungan.

Kompleksitas permasalahan pengungkapan emisi karbon tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa variabel kunci yang diprediksi memengaruhi keputusan manajemen, yaitu kepemilikan asing, ukuran perusahaan, kinerja lingkungan, dan profitabilitas. Kepemilikan asing dipandang relevan karena secara teoritis investor institusional asing terutama dari negara maju membawa standar *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang lebih ketat serta menuntut transparansi tinggi sebagai bentuk akuntabilitas global. Melalui mekanisme pengawasan dan hak suara, mereka berpotensi menekan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengungkapan. Namun, realitas di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa tingginya kepemilikan asing tidak selalu berbanding lurus dengan praktik pengungkapan emisi yang baik, khususnya ketika investor asing berorientasi pada keuntungan jangka pendek atau bersifat pasif dalam fungsi pengawasan.

Selain itu, ukuran perusahaan berdasarkan Teori Legitimasi diasumsikan berbanding lurus dengan tingkat tekanan publik. Perusahaan besar memiliki visibilitas dan eksposur politis yang lebih tinggi sehingga terdorong untuk lebih transparan demi menjaga legitimasi sosial. Akan tetapi, anomali empiris menunjukkan bahwa sebagian perusahaan besar justru membatasi detail pengungkapan untuk menghindari risiko reputasi dan potensi sanksi regulasi, sementara perusahaan berskala menengah dalam beberapa kasus lebih proaktif membangun citra positif melalui pelaporan lingkungan. Dengan demikian, dinamika antara karakteristik kepemilikan, skala perusahaan, serta orientasi

manajerial menjadi faktor penting dalam menjelaskan variasi kualitas pengungkapan emisi karbon di Indonesia.

Sementara itu, kinerja lingkungan yang diproksikan melalui peringkat PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki relevansi kuat, karena perusahaan dengan peringkat Hijau atau Emas seharusnya terdorong mengungkapkan emisi karbon secara lebih luas sebagai sinyal positif kepada pasar, meskipun perusahaan dengan peringkat Merah atau Hitam kerap memilih strategi defensif atau bahkan menutup informasi untuk menyamarkan kinerja buruk. Profitabilitas turut memperkaya dinamika tersebut, karena perusahaan yang lebih menguntungkan memiliki sumber daya lebih besar untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan dan pelaporan emisi. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas mencerminkan kapasitas perusahaan dalam memenuhi tuntutan transparansi lingkungan. Namun, pada periode 2022–2024 yang ditandai fluktuasi ekonomi dan tekanan biaya produksi, pelaporan keberlanjutan sering dipandang sebagai beban tambahan (Febriani et al., 2024). Kondisi ini menimbulkan dilema, di mana profitabilitas dapat mendorong sekaligus menghambat pengungkapan emisi karbon, karena perusahaan cenderung memprioritaskan efisiensi biaya dan stabilitas laba.

Penelitian terdahulu mengenai pengungkapan emisi karbon pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan hasil yang beragam sehingga menimbulkan inkonsistensi empiris. Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan emisi karbon menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyaningsih dan Rahmadiah (2024) menemukan bahwa kepemilikan asing cenderung berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon pada sektor energi dan barang primer. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan asing tidak selalu mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi terkait emisi karbon. Sebaliknya, penelitian (Oyerogba et al., 2025) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan minyak dan gas yang terdaftar di Nigeria, yang mengindikasikan bahwa investor asing cenderung mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam pengungkapan informasi lingkungan. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh

Pramuditya Budiasih (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon pada sektor pertambangan.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan tingkat pengungkapan emisi karbon perusahaan. Penelitian (Desai, 2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan yang terdaftar dalam Carbon Disclosure Project (CDP) wilayah Nordik. Hasil serupa juga ditemukan oleh Eka Dewayani dan Ratnadi (2021) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi tingkat pengungkapan emisi karbon yang dilakukan. Namun, Padila et al. (2025) menemukan hasil yang berbeda, yaitu ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap pelaporan emisi karbon karena perusahaan besar cenderung mempertimbangkan risiko kerusakan citra apabila informasi emisi yang diungkapkan menunjukkan dampak lingkungan yang buruk. Sementara itu, Arsy dan Amin (2025) serta Gunawan dan Aryati (2024) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon pada sektor *Basic Materials*. Temuan ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya skala perusahaan tidak selalu menentukan tingkat keterbukaan perusahaan dalam mengungkapkan informasi terkait emisi karbon. Dengan kata lain, perusahaan yang memiliki total aset atau skala operasi yang besar belum tentu lebih aktif dalam melakukan pengungkapan emisi karbon dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran lebih kecil.

Kinerja lingkungan merupakan salah satu variabel yang sering digunakan untuk menjelaskan tingkat pengungkapan emisi karbon perusahaan. Penelitian Yesiani et al. (2023) menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, yang berarti semakin baik kinerja lingkungan perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan emisi karbon yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan cenderung lebih proaktif dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan dengan menjaga aktivitas operasionalnya agar tetap sesuai dengan ketentuan yang tidak merusak lingkungan. Namun, hasil penelitian Sukmawati (2023) menunjukkan temuan yang berbeda, yaitu kinerja lingkungan berpengaruh negatif terhadap

pengungkapan emisi karbon pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018–2019. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peringkat PROPER yang diperoleh perusahaan belum mampu menjelaskan tingkat pengungkapan emisi karbon secara luas, karena pengungkapan emisi karbon masih bersifat sukarela dan belum banyak perusahaan yang melakukannya. Sementara itu Dewayani & Ratnadi (2021) serta Suhardi (2025) yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon perusahaan. emuan ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja lingkungan yang baik belum tentu diikuti oleh tingkat keterbukaan perusahaan dalam mengungkapkan informasi terkait emisi karbon. Dengan kata lain, perusahaan yang memperoleh penilaian kinerja lingkungan yang lebih tinggi tidak selalu melakukan pengungkapan emisi karbon secara lebih luas dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan.

Profitabilitas sering dikaitkan dengan kemampuan perusahaan dalam mengungkapkan informasi lingkungan, termasuk emisi karbon. Penelitian (Chariri et al., 2023) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh postif signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon, yang mengindikasikan bahwa tingkat keuntungan perusahaan mencerminkan keberhasilannya dalam mengungkapkan informasi emisi karbon melalui laporan keberlanjutan. Profitabilitas juga menjadi dasar bagi perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya keuangan untuk berbagai kegiatan, termasuk pengungkapan informasi lingkungan. Namun, Wulandari et al. (2025) menemukan hasil yang berbeda, yaitu profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin rendah tingkat pengungkapan emisi karbon yang dilakukan. Temuan tersebut tidak sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik cenderung mengungkapkan informasi lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk mempertahankan legitimasi di mata masyarakat.Perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi diduga merasa tidak perlu melakukan pengungkapan tambahan karena kinerja finansialnya sudah cukup merepresentasikan reputasi perusahaan di hadapan publik dan investor. Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki

pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon, seperti yang ditemukan oleh Dewayani dan Ratnadi (2021) serta Arsy dan Amin (2025) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak selalu menjadi faktor utama yang mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait emisi karbon.

Beragamnya temuan empiris tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kepemilikan asing, ukuran perusahaan, kinerja lingkungan, dan profitabilitas terhadap pengungkapan emisi karbon masih belum konsisten dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik sektor industri, periode penelitian, serta proksi pengukuran yang digunakan. Inkonsistensi ini mengindikasikan adanya kemungkinan faktor kontekstual, seperti tekanan regulasi, eksposur internasional, serta tingkat sensitivitas lingkungan masing-masing industri, yang turut memengaruhi kebijakan pengungkapan perusahaan. Selain itu, perbedaan periode penelitian terutama sebelum dan sesudah penguatan komitmen Indonesia terhadap Persetujuan Paris serta meningkatnya tuntutan pelaporan keberlanjutan dapat menyebabkan variasi dalam perilaku pengungkapan emisi karbon perusahaan.

Meskipun penelitian mengenai pengungkapan emisi karbon telah berkembang pesat, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan, baik secara empiris maupun kontekstual. Secara empiris, hasil penelitian terdahulu menunjukkan inkonsistensi terkait pengaruh kepemilikan asing, ukuran perusahaan, kinerja lingkungan, dan profitabilitas terhadap pengungkapan emisi karbon. Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antarvariabel belum bersifat konklusif dan masih dipengaruhi oleh karakteristik sampel, sektor industri, serta periode pengamatan yang berbeda. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan periode sebelum penguatan komitmen global terhadap perubahan iklim dan sebelum implementasi kebijakan ekonomi karbon di Indonesia, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan dinamika terbaru dalam praktik pelaporan keberlanjutan perusahaan.

Dari sisi kontekstual, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan mengkaji pengungkapan emisi karbon pada periode 2022–2024, yaitu fase

krusial pascapandemi COVID-19 yang ditandai dengan pemulihan aktivitas industri sekaligus penguatan kebijakan transisi menuju ekonomi rendah karbon, termasuk implementasi *Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC)* dan operasionalisasi Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon). Selain itu, penelitian ini secara spesifik berfokus pada sektor manufaktur yang memiliki kontribusi emisi terbesar di Indonesia namun masih menunjukkan tingkat pengungkapan karbon yang relatif rendah dan tidak konsisten. Kebaruan lainnya terletak pada integrasi variabel kepemilikan asing, ukuran perusahaan, kinerja lingkungan, dan profitabilitas dalam satu model penelitian yang komprehensif untuk menjelaskan determinan pengungkapan emisi karbon dalam konteks negara berkembang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya mengisi kesenjangan empiris yang ada, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi regulator dan pelaku industri dalam meningkatkan transparansi serta kualitas pelaporan emisi karbon di Indonesia.

Berdasarkan adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu serta dinamika regulasi dan tuntutan transparansi yang semakin meningkat, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh bukti empiris terbaru mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan emisi karbon pada perusahaan manufaktur periode 2022–2025. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "**Pengaruh Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, Kinerja Lingkungan dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2025".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat pengungkapan emisi karbon pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024, meskipun telah terdapat kewajiban pelaporan keberlanjutan melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 dan berbagai regulasi lingkungan lainnya.
2. Kepemilikan asing memiliki kecenderungan memengaruhi tingkat pengungkapan emisi karbon karena investor asing umumnya membawa

standar lingkungan dan pelaporan keberlanjutan yang lebih ketat. Namun, dalam praktiknya perusahaan dengan tingkat kepemilikan asing yang tinggi tidak selalu menunjukkan pengungkapan emisi karbon yang lebih baik.

3. Ukuran perusahaan sering dikaitkan dengan pengungkapan emisi karbon karena semakin besar perusahaan, semakin besar pula aktivitas operasional dan potensi dampak lingkungannya. Perusahaan besar diharapkan lebih transparan dalam mengungkapkan emisi karbon, namun tidak semua melakukannya secara konsisten, namun pada kenyataannya tidak semua perusahaan besar melakukannya secara konsisten.
4. Kinerja lingkungan mencerminkan sejauh mana perusahaan menjalankan pengelolaan lingkungan yang baik. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik cenderung mengungkapkan emisi karbon lebih luas sebagai bentuk transparansi. Namun, perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik belum tentu mengungkapkan emisi karbon secara lebih lengkap, sehingga muncul dugaan adanya *symbolic disclosure* atau *greenwashing*.
5. Profitabilitas cenderung memengaruhi kemampuan perusahaan dalam mendukung pengelolaan lingkungan dan pelaporan keberlanjutan. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi seharusnya memiliki kapasitas lebih besar untuk mengungkapkan emisi karbon, namun pada kenyataannya tidak selalu menunjukkan tingkat pengungkapan yang lebih baik.
6. Inkonsistensi hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh kepemilikan asing, ukuran perusahaan, kinerja lingkungan, dan profitabilitas terhadap pengungkapan emisi karbon, sehingga belum diperoleh kesimpulan yang konklusif khususnya pada sektor manufaktur di Indonesia.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan agar pembahasan tetap terfokus pada tujuan yang telah dirumuskan serta menghindari terjadinya perbedaan penafsiran akibat ruang lingkup yang terlalu luas. Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini dibatasi pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi Pengungkapan Emisi Karbon, yaitu Kepemilikan Asing, Ukuran

Perusahaan, Kinerja Lingkungan, dan Profitabilitas. Adapun populasi penelitian mencakup perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2025?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2025?
3. Apakah kinerja lingkungan yang diproksikan melalui peringkat PROPER berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2025?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2025?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2025.
2. Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2025.
3. Menguji pengaruh kinerja lingkungan yang diproksikan melalui peringkat PROPER terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2025.

4. Menguji pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2025.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti mengharapkan adanya manfaat
yang dapat diperoleh, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan emisi karbon pada perusahaan manufaktur, khususnya terkait pengaruh kepemilikan asing, ukuran perusahaan, kinerja lingkungan, dan profitabilitas terhadap transparansi pelaporan emisi karbon dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan perusahaan..

2. Bagi Akademik

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akuntansi lingkungan dan pelaporan keberlanjutan, khususnya yang berkaitan dengan praktik pengungkapan emisi karbon perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji determinan pengungkapan emisi karbon serta memperkaya literatur akademik mengenai transparansi lingkungan perusahaan di Indonesia..

3. Bagi Praktisi

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam meningkatkan transparansi dan kualitas pengungkapan emisi karbon sebagai bagian dari akuntabilitas lingkungan perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menilai komitmen perusahaan terhadap pengelolaan emisi karbon dan praktik bisnis yang berkelanjutan.